

# TATA RUANG DAN AMBISI PEMEKARAN KABUPATEN INDRAMAYU: TINJAUAN HIERARKI CHRISTALLER

Anth Meylisa Hardadi<sup>1</sup>, Adia Alilatulbariza<sup>2</sup>, Ayu Nuraeni<sup>3</sup>,  
Selsya Nesha Beiher Lumentut<sup>4</sup>, Sri Aulia<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia

Ameylisaa@student.upi.edu

Artikel Info : diterima 08/06/2026, revisi 19/06/2026, publish 30/06/2026

## ABSTRACT

*This research evaluates the ineffectiveness of the spatial hierarchy in Indramayu Regency, which triggers development disparities between the central and western regions. Applying Walter Christaller's Central Place Theory, this qualitative descriptive study examines the rationality behind the demand for the establishment of the West Indramayu New Autonomous Region (DOB). Data were gathered through field observations, in-depth interviews, and secondary sources, and then analyzed using the Central Place Theory and the evaluation of regional expansion feasibility parameters. The findings indicate a functional failure in the maximum range of the parent city's service center; residents in the western region must travel 70 km (taking 1.5–3 hours) to access high-order services. This spatial barrier triggers a leakage in public mobility orientation toward Subang Regency. Theoretically, the proposed West Indramayu New Autonomous Region has exceeded the required threshold, supported by a demographic base of over 700,000 inhabitants and a high centrality index in Kroya District as the prospective capital. This study concludes that regional expansion in West Indramayu is not merely a political commodity, but rather a logical spatial necessity.*

**Keywords:** *Central Place Theory, Indramayu Regency, Regional Expansion, Spatial Inequality, Spatial Planning.*

## ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi ketidakefektifan hierarki tata ruang di Kabupaten Indramayu yang memicu ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan kawasan barat. Menggunakan pendekatan *Central Place Theory* Walter Christaller, penelitian deskriptif kualitatif ini mengkaji rasionalitas tuntutan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Indramayu Barat. Data dihimpun melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan data sekunder, yang dianalisis menggunakan *Central Place Theory* serta evaluasi parameter kelayakan pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kegagalan fungsi jangkauan maksimal (*range*) pusat pelayanan kota induk: masyarakat kawasan barat harus menempuh jarak 70 km (1,5–3 jam) untuk mengakses layanan orde tinggi. Hambatan spasial ini memicu kebocoran orientasi mobilitas publik ke Kabupaten Subang. Secara teoretis, calon DOB Indramayu Barat telah melampaui ambang batas (*threshold*) dengan basis demografi >700.000 jiwa dan indeks sentralitas tinggi di Kecamatan Kroya sebagai calon ibu kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah di Indramayu Barat bukan sekadar komoditas politik, melainkan kebutuhan spasial yang logis.

**Kata kunci:** *Central Place Theory, Kabupaten Indramayu, Ketimpangan Spasial, Pemekaran Wilayah, Tata Ruang.*

## A. LATAR BELAKANG

Studi mengenai tata ruang dan hierarki pusat pelayanan sangat krusial untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan wilayah serta dampaknya terhadap keseimbangan spasial. Fenomena ketimpangan pembangunan sering menjadi pemicu utama munculnya dinamika politik lokal, termasuk kuatnya tuntutan pemekaran wilayah administratif di berbagai daerah (Dmitriev et al., 2024). Stabilitas struktur ruang sangat bergantung pada *Central Place Theory* (Teori Tempat Sentral) dari Christaller, yang menjadi instrumen analisis fundamental dalam membedah distribusi fungsional dan jangkauan pelayanan publik di tingkat lokal. Teori ini menunjukkan bahwa sebuah pusat pelayanan idealnya memiliki keseimbangan dalam melayani wilayah penyokongnya (*hinterland*). Keseimbangan keruangan tersebut diwujudkan melalui tiga prinsip utama, yaitu prinsip pasar ( $K=3$ ), transportasi ( $K=4$ ), dan administrasi ( $K=7$ ) (Koraag, et al., 2024).

Prinsip urusan pasar ( $K=3$ ) adalah sebuah pusat yang melayani sepertiga dari kawasan di sekitarnya (Faizal, A, 2026). Hal ini untuk memastikan setiap konsumen mendapatkan jarak jangkauan terpendek dan distribusi ekonomi yang merata, seperti kebutuhan distribusi ekonomi berupa penyediaan barang dan jasa. Selanjutnya, prinsip akses transportasi ( $K=4$ ) beroperasi dengan mengikat setengah kawasan pinggiran di sepanjang jalur utama guna menciptakan efisiensi rute lalu lintas dan menekan biaya logistik antarwilayah. Prinsip  $K=4$  mempermudah akses jalur jalan utama yang menghubungkan wilayah tersebut dengan pusat-pusat tetangganya. Di ranah politik dan birokrasi, keseimbangan ini ditopang oleh prinsip pusat administrasi ( $K=7$ ), yaitu sebuah pusat pemerintahan harus menaungi secara utuh seratus persen wilayah bawahannya tanpa adanya tumpang tindih kewenangan demi tegaknya stabilitas pelayanan publik yang terpadu.

Kabupaten Indramayu merepresentasikan gambaran anomali dari kegagalan tata ruang wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (2025) mencatat bahwa Kabupaten Indramayu menghasilkan total luas panen padi mencapai 10,5 juta hektare, dengan akumulasi total produksi menyentuh angka sebesar 53,14 juta ton GKG pada tahun 2024. Namun, potensi sumber daya agraris dan pesisir ini berbenturan keras dengan tekanan demografi perubahan kawasan perkotaan yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu (2024), tercatat total penduduk per Desember 1.980.080 jiwa dengan kepadatan penduduk 950/km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan sebesar 1,16%.

Situasi ini menjadi masalah penelitian yang serius karena tingginya angka laju demografi tersebut tidak diimbangi dengan struktur jangkauan aksesibilitas antarruang yang merata. Pola dinamika sistem administratif saat ini menunjukkan fokus terpusat pada sektor pelayanan sehingga mengabaikan aspek fungsional antarwilayah kawasan penyangga dan menciptakan jarak struktural yang jauh bagi masyarakat. Kesenjangan infrastruktur dan jauhnya aksesibilitas menjadi argumen kuat bagi ambisi pemekaran daerah di pesisir Indramayu. Hal ini merupakan akibat langsung dari ketidakefektifan tata ruang dan keruntuhan hierarki administratif. Akibatnya, masyarakat harus menempuh waktu yang relatif lama untuk menjangkau pusat layanan.

Meskipun *Central Place Theory* (CPT) dan isu pemekaran wilayah sering dikaji, terdapat kesenjangan literatur (*research gap*) yang signifikan terkait penerapannya pada wilayah transisi agraris-pesisir yang menghadapi tekanan demografi tinggi seperti Indramayu. Kajian literatur mengenai pemekaran wilayah selama ini menunjukkan bias teoretis yang kuat, analisisnya cenderung direduksi menjadi sebatas dinamika politik lokal dan perebutan alokasi anggaran. Hal ini terkonfirmasi oleh temuan Rian Nugraha et al. (2024) yang menunjukkan bahwa lebih dari 75% wacana pemekaran daerah pasca-desentralisasi lebih didorong oleh motif pemenuhan kuota Dana Alokasi Umum (DAU) ketimbang optimalisasi ruang. Di sisi lain, penelitian tata ruang terdahulu telah membuktikan bahwa ketidakraturan struktur keruangan dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antarwilayah (Jain, 2018). Kerentanan ini juga diperburuk oleh minimnya fasilitas, AlKheder et al. (2023) dan Dzhurka (2024) mencatat bahwa hampir 60% masyarakat di kawasan pinggiran berada di luar jangkauan radius pelayanan ideal (>5 km) sehingga melipatgandakan biaya transportasi harian mereka. Namun, belum ada studi yang secara khusus membuktikan apakah tuntutan pemekaran tersebut murni disebabkan oleh gagalnya struktur tata ruang atau akibat runtuhnya hierarki pelayanan di kawasan pinggiran. Kondisi ketimpangan yang tidak segera diukur secara empiris ini pada akhirnya akan menciptakan sekat isolasi spasial bagi masyarakat (Putra & Ekomadyo, 2022).

Untuk mengisi kekosongan studi tersebut, evaluasi keruangan tidak cukup hanya mengandalkan *Central Place Theory* (CPT), tetapi harus diukur melalui indikator empiris yang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi parameter faktor kelayakan wilayah untuk mekar yang dirumuskan berdasarkan tinjauan tata ruang kewilayahan (L. Somantri, komunikasi pribadi, 12 Mei 2026). Parameter evaluasi ini mencakup pengukuran objektif terhadap jarak tempuh ideal ke pusat pemerintahan, ketersediaan fasilitas penunjang (Kesehatan, pasar, dan pendidikan), kelayakan infrastruktur transportasi dasar, keseimbangan rasio kepadatan penduduk, potensi kemandirian finansial daerah (PAD), serta indeks sentralitas calon ibu kota baru. Integrasi antara kerangka teori Christaller dengan instrumen parameter spasial ini secara spesifik ditujukan untuk membuktikan apakah urgensi pemekaran Indramayu Barat murni didasari oleh rasionalitas kebutuhan ruang yang faktual. Lebih jauh lagi, pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang objektif guna memastikan bahwa pembentukan daerah otonom baru tersebut benar-benar bermuara pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesenjangan dari hasil literatur, tujuan utama artikel adalah untuk menganalisis penyebab ketidaksesuaian antara pembangunan tata ruang Indramayu dan keterkaitannya dengan munculnya gagasan pemekaran wilayah. Penelitian ini dievaluasi secara objektif menggunakan pendekatan *Central Place Theory* (CPT) dari Christaller guna mengukur titik jenuh fungsional kawasan. Pendekatan ini diaplikasikan untuk mengidentifikasi apakah struktur hierarki ruang yang terbentuk masih relevan atau justru telah mengalami keruntuhan akibat rentang kendali yang terlalu luas. Untuk menjaga kedalaman fokus riset, batasan penelitian (limitation) ini tidak berfokus pada aspek politik, melainkan membatasi diri pada parameter keruangan dan fungsional, yakni memetakan pola persebaran administratif pemekaran daerah dengan jangkauan pelayanan masyarakat secara nyata (Martin & Novotný, 2024; Jones, 2017). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan evaluasi bagi perencanaan kebijakan pemerintah daerah sebagai pertimbangan berbasis kekuatan hierarki antarruang untuk membuktikan kegagalan tata ruang pada tingkat lokal.

## B. METODE PENELITIAN

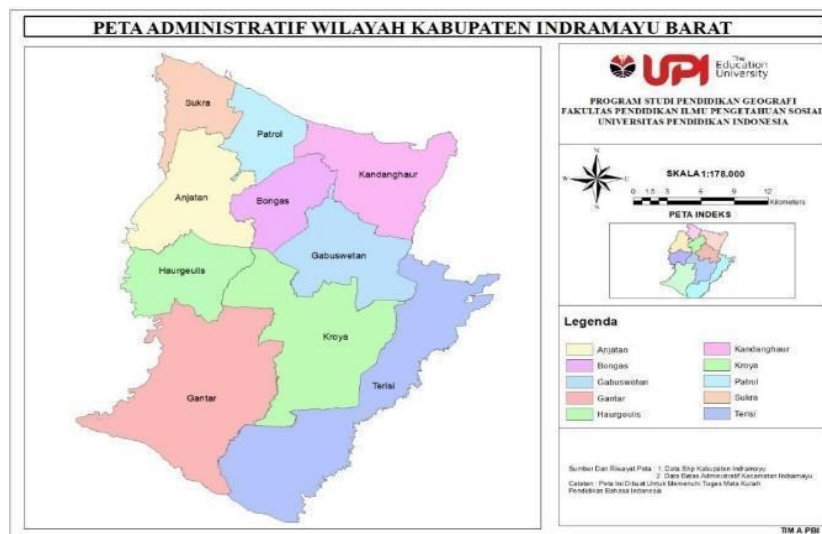
Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengeksplorasi fenomena ketidakefektifan tata ruang dan aspirasi pemekaran wilayah di Kabupaten Indramayu secara mendalam. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pergeseran fungsi hierarki tempat sentral Christaller dalam konteks kebijakan administratif lokal, Kabupaten Indramayu dinilai sangat representatif karena ketimpangan distribusi fasilitas publiknya memicu dinamika politik lokal. Fokus penelitian diarahkan pada elemen keruangan pembentukan struktur wilayah dan tingkat aksesibilitas pelayanannya (pola pemukiman, pusat layanan publik, infrastruktur penunjang), yang kemudian dianalisis untuk mengukur jangkauan pelayanan (orde) pada setiap pusat pertumbuhan.

Data primer dikumpulkan melalui teknik observasi langsung ke lapangan serta wawancara mendalam terkait kondisi keruangan dan pelayanan wilayah, didukung dengan penggunaan media rekam, seperti foto, video, dan perekam suara untuk menjamin keabsahan fakta. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur untuk melengkapi dan memvalidasi informasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan menggunakan *Central Place Theory* (CPT) untuk mengukur jangkauan pelayanan serta dievaluasi kelayakannya berdasarkan parameter faktor pembentukan daerah otonom baru. Hal ini dilakukan untuk membedah ketimpangan tata kelola spasial serta memetakan keterkaitan antara dinamika ekonomi, politik lokal, dan tata kelola spasial tersebut.

Tahapan penelitian diawali melalui penyusunan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan terstruktur dan pedoman observasi sebagai panduan dasar di lapangan. Selanjutnya, pengumpulan data mentah dilakukan dengan terjun langsung melalui observasi dan wawancara mendalam bersama masyarakat di kawasan barat Indramayu guna melihat kondisi tata ruang secara nyata. Seluruh hasil rekaman, catatan lapangan, dan informasi yang telah terkumpul tersebut pada akhirnya diolah secara mendalam menggunakan pisau analisis *Central Place Theory* (CPT) dan parameter faktor pembentukan daerah otonom baru, lalu disintesis secara komprehensif hingga menghasilkan sebuah output berupa karya ilmiah atau artikel yang utuh.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif, wilayah Kabupaten Indramayu menghadapi tantangan efektivitas spasial akibat luasnya cakupan wilayah dan penyebaran penduduk yang menuntut pemerataan akses layanan publik. Data spasial dan demografis terbaru menunjukkan bahwa kawasan Indramayu bagian barat dihuni oleh lebih dari 700.000 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 768 jiwa/km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2024). Skala kependudukan yang masif ini mengindikasikan bahwa wilayah barat telah melampaui batas minimum (*threshold*) untuk mendukung operasional fasilitas berskala besar, seperti rumah sakit rujukan dan infrastruktur pemerintahan mandiri. Oleh karena itu, evaluasi terhadap struktur keruangan ini akan difokuskan pada analisis parameter efisiensi jangkauan layanan dasar, kapasitas aksesibilitas infrastruktur, dan persepsi sosial terhadap pemerataan wilayah. Parameter tersebut akan dibedah menggunakan lensa teori tempat sentral Christaller untuk menjelaskan dinamika ketimpangan yang mendasari aspirasi pemekaran daerah otonom baru. Untuk memberikan gambaran visual mengenai cakupan wilayah kajian, tata letak, dan batas-batas administratif calon daerah otonomi baru dapat dilihat dari



Gambar 1. Peta Administratif Wilayah Kabupaten Indramayu Barat.

Berdasarkan peta administratif di atas, terlihat secara spasial susunan wilayah yang ditampilkan tergabung dalam Daerah Otonom Baru (DOB) Indramayu Barat, yang mencakup sepuluh kecamatan (Haurgeulis, Gantar, Kroya, Gabuswetan, Terisi, Kandanghaur, Bongas, Anjatan, Sukra, dan Patrol).

Secara geografis, letak Kecamatan Kroya berada di posisi yang strategis di tengah tatanan kesepuluh kecamatan tersebut. Wilayah Kroya berbatasan langsung dengan Gantar dan Haurgeulis di barat, Gabuswetan di utara, serta Terisi di timur. Posisi sentral ini menjadikan Kroya sangat ideal sebagai pusat tata kelola pemerintahan yang baru. Sentralitas geografis ini diyakini mampu mempermudah aksesibilitas pelayanan publik sekaligus memperpendek kendali birokrasi, baik dari kawasan pesisir utara (Sukra) maupun pedalaman selatan (Gantar). Dengan demikian, Kroya berpotensi besar mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi bagi kemajuan DOB Indramayu Barat kelak.

Untuk membuktikan urgensi pemekaran wilayah, dinamika spasial Kabupaten Indramayu saat ini perlu dibedah lebih dalam menggunakan lensa *Central Place Theory* dari Christaller. Evaluasi keruangan ini difokuskan pada tiga prinsip utama hierarki tempat sentral, yaitu prinsip pemasaran ( $K=3$ ) untuk melihat orientasi pergerakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, prinsip transportasi ( $K=4$ ) guna mengukur hambatan aksesibilitas akibat jarak dan prinsip administrasi ( $K=7$ ) untuk menilai keadilan serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Hasil analisis terhadap ketiga prinsip fungsional tersebut, dipadukan dengan tinjauan kelayakan spasial dan respons kebijakan pemerintah, akan menguraikan akar masalah ketimpangan tata ruang secara komprehensif sekaligus memvalidasi kelayakan rasional dari pembentukan DOB Indramayu Barat. Oleh sebab itu, penjabaran pada subbab ini secara khusus dirancang untuk mendemonstrasikan secara sistematis bagaimana keruntuhan hierarki keruangan tersebut memicu urgensi pemekaran wilayah kabupaten Indramayu

### **1. Jangkauan Pelayanan dan Kebocoran Orientasi Spasial (Prinsip Pemasaran $K=3$ )**

Berdasarkan prinsip pemasaran (marketing principle atau  $K=3$ ), distribusi fasilitas pemenuhan kebutuhan di Indramayu Barat menunjukkan pemisahan antara pelayanan orde rendah dan orde tinggi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi melalui toko kelontong dan puskesmas yang tersebar cukup merata di tingkat desa. Namun, untuk mengakses layanan berorde tinggi seperti rumah sakit rujukan dan pengurusan dokumen administratif, masyarakat perbatasan masih harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota Indramayu. Dalam perspektif teori Christaller, kondisi ini menunjukkan kegagalan fungsi *range* (jangkauan maksimal) pusat pelayanan karena jarak yang ditempuh telah melampaui batas efisiensi masyarakat.

Akibatnya, terjadi pergeseran orientasi pergerakan ke Kabupaten Subang yang dianggap lebih dekat dan efisien. Fenomena ini sejalan dengan temuan Dzhurka (2024) bahwa kedekatan fungsional kerap mengungguli batas administratif formal. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat di wilayah Indramayu Barat, diperoleh gambaran bahwa aspirasi terhadap pemekaran daerah sangat kuat. Seluruh responden (100%) menyatakan persetujuan terhadap rencana pemekaran wilayah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Tingginya tingkat persetujuan tersebut didorong oleh kondisi geografis yang menyebabkan masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh menuju pusat pemerintahan, sehingga berbagai layanan dasar dan administrasi menjadi kurang mudah diakses.

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat pada umumnya masih dapat memperoleh kebutuhan dasar, seperti sembako dan layanan kesehatan dasar, melalui toko kelontong, apotek, maupun fasilitas kesehatan terdekat yang dinilai cukup memadai. Namun demikian, untuk memperoleh pelayanan yang bersifat administratif maupun layanan kesehatan lanjutan, masyarakat masih harus menuju pusat kota yang berjarak 70 km dengan waktu tempuh berkisar antara 1,5 hingga 3 jam. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam memperoleh pelayanan publik secara cepat dan efisien.

Hasil wawancara juga menunjukkan titik tekanan (*pain points*) yang dirasakan masyarakat. Pertama, jarak dan waktu tempuh menuju pusat pemerintahan yang relatif jauh menyebabkan tingginya biaya, waktu, dan tenaga yang harus dikeluarkan. Kedua, ketersediaan transportasi umum masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun frekuensi layanan, sehingga masyarakat lebih banyak bergantung pada kendaraan pribadi dengan biaya yang relatif mahal. Ketiga, ketika menghadapi kebutuhan yang bersifat mendesak, seperti rujukan kesehatan atau pengurusan dokumen administrasi, masyarakat mengalami kesulitan karena seluruh layanan tersebut terpusat di kota yang lokasinya cukup jauh dari wilayah tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut tercermin dalam pernyataan salah satu warga yang menyampaikan bahwa masyarakat di wilayah barat merasa kurang mendapatkan perhatian karena layanan kesehatan rujukan maupun pengurusan dokumen administrasi mengharuskan perjalanan yang panjang dan menguras tenaga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan aspek jarak, tetapi juga menyangkut efektivitas pelayanan publik dan rasa keadilan dalam memperoleh akses layanan pemerintahan.



Hal ini menunjukkan bahwa urgensi pemekaran wilayah di Indramayu Barat dipengaruhi oleh kesenjangan akses terhadap pelayanan publik. Kebutuhan dasar masyarakat, seperti sembako, layanan kesehatan tingkat pertama, dan apotek, pada umumnya telah terpenuhi melalui fasilitas yang tersedia di sekitar tempat tinggal. Namun, kendala masih ditemukan dalam pemenuhan kebutuhan berorde tinggi yang mengharuskan masyarakat melakukan perjalanan ke pusat kota. Hambatan tersebut tercermin dari jarak tempuh sekitar 70 km dengan waktu perjalanan 1,5–3 jam serta keterbatasan transportasi umum. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar, terutama untuk mengakses layanan kesehatan rujukan dan pengurusan dokumen administratif. Selain itu, 100% responden mendukung pemekaran wilayah dengan alasan pemerataan layanan publik, percepatan pembangunan ekonomi, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. Temuan tersebut memperkuat urgensi pemekaran sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

## **2. Hambatan Spasial dan Ketimpangan Aksesibilitas Transportasi (Prinsip Transportasi K=4)**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, warga di wilayah perbatasan ujung barat harus menempuh jarak fisik sejauh 70 kilometer yang memakan waktu hingga 1,5 sampai 3 jam perjalanan untuk mencapai pusat pemerintahan di Indramayu Kota. Hambatan keruangan yang signifikan ini semakin diperparah oleh kendala ekonomi, yakni mahalnya tarif angkutan umum yang membebani masyarakat hingga mencapai Rp50.000,00 untuk satu kali perjalanan. Kesulitan aksesibilitas tersebut juga ditambah dengan fenomena penyusutan jumlah armada angkutan massal lokal seperti *elf*, yang membuat pilihan mobilitas warga menjadi sangat terbatas. Selain ketersediaan armada yang semakin minim, kurangnya fasilitas penunjang seperti penerangan jalan umum turut meningkatkan risiko perjalanan warga menuju pusat kota. Akumulasi dari kendala jarak, tingginya biaya, dan minimnya fasilitas infrastruktur ini pada akhirnya membentuk sebuah pembatas spasial yang menyulitkan pergerakan harian masyarakat.

Jika dianalisis dalam kerangka Teori Tempat Sentral Christaller, sistem tata ruang dengan prinsip transportasi ( $K=4$ ) seharusnya mengidealkan pola jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat layanan secara linear. Konsep ideal tersebut dirancang demi menciptakan rute lalu lintas yang paling efisien dan murah agar dapat mengakomodasi seluruh mobilitas penduduk secara merata. Namun, temuan empiris di lapangan membuktikan bahwa Indramayu Kota telah gagal mengendalikan jangkauannya secara optimal karena biaya dan jauhnya jarak sudah melampaui batas toleransi penduduk. Kondisi ekstrem ini sangat relevan dengan kajian efek jarak pada transformasi urban oleh Jain (2018), yang menegaskan bahwa batas jarak fisik secara mutlak mendikte kualitas interaksi spasial di suatu wilayah. Sesuai dengan penjelasan dalam kajian tersebut, ketika hambatan keruangan melampaui toleransi, masyarakat di wilayah *hinterland* akan secara natural terputus dari pusat layanan utamanya.

### **3. Sentralitas Kawasan dan Urgensi Pemekaran Administratif (Prinsip Administrasi $K=7$ )**

Evaluasi terhadap prinsip administrasi ( $K=7$ ) menunjukkan bahwa struktur tata ruang saat ini gagal menciptakan tata kelola yang berkeadilan bagi seluruh wilayah. Kegagalan struktural tersebut pada akhirnya memicu wacana pemisahan sistem hierarki secara radikal di tengah masyarakat sebagai bentuk protes terhadap pola pembangunan yang sentralistik. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di kawasan Indramayu Barat merasa sangat tersisihkan dari atensi pembangunan daerah akibat adanya ketimpangan alokasi program lintas sektor. Perasaan tersisihkan ini secara kasat mata terindikasi dari minimnya ruang publik, yakni sebuah kondisi ketimpangan spasial yang kerap memicu risiko sosial spasial dalam konteks tata kelola pembangunan wilayah. Kondisi kesenjangan ini pada gilirannya mendorong kebulatan suara dari warga yang menganggap bahwa pemekaran wilayah menjadi daerah otonom baru adalah solusi mutlak untuk mendekatkan aksesibilitas layanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi lokal, serta mengentaskan ketertinggalan secara struktural.

Secara keruangan, aspirasi masyarakat ini didukung oleh fakta bahwa calon ibu kota baru di Kecamatan Kroya memiliki indeks sentralitas yang tinggi. Wilayah Kroya berada tepat di titik tengah geometris sebagai pusat pertumbuhan baru di tingkat kecamatan, dengan jarak tempuh rasional rata-rata 30 hingga 60 menit dari sepuluh kecamatan anggota pemekaran. Dinamika spasial-politik ini telah direspons secara afirmatif oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui penetapan titik 0 di Kroya dan komitmen penguatan infrastruktur pada tahun anggaran 2025 sebagai langkah persiapan konkret. Dalam perspektif teori Christaller, tuntutan pemekaran ini pada hakikatnya merupakan upaya merestrukturisasi batas administrasi ( $K=7$ ) agar kembali memusat dan melingkupi wilayah layanannya secara efisien, meskipun realisasinya masih tertahan oleh kebijakan moratorium dari pemerintah pusat. Temuan ini memperkuat kesimpulan dari Suherman et al. (2024) yang menyatakan bahwa wacana pemekaran wilayah bukanlah sekadar sentimen teritorial, melainkan solusi strategis yang paling rasional untuk mengurai ketimpangan ruang yang kronis.

#### **4. Kelayakan Spasial dan Kemandirian Wilayah Baru (Parameter Observasi Kelayakan)**

Tinjauan lebih lanjut terhadap kelayakan pemekaran menunjukkan bahwa kawasan Indramayu Barat secara objektif telah memiliki kapasitas kemandirian struktural yang mumpuni untuk beroperasi sebagai sebuah sistem tempat sentral baru yang otonom. Berdasarkan hasil observasi parameter wilayah, kawasan ini didukung oleh basis demografi yang masif dengan populasi melampaui 700.000 jiwa dan tingkat kepadatan mencapai 768 jiwa/km<sup>2</sup>. Skala kependudukan ini memberikan jaminan mutlak bagi ketersediaan sumber daya manusia sekaligus kepastian adanya pengguna layanan (*threshold*) bagi operasional fasilitas berskala besar. Kapasitas ini secara nyata telah ditopang oleh keberadaan infrastruktur penunjang yang eksis, meliputi RSUD Pantura MA Sentot di Patrol, pasar-pasar induk besar di Haurgeulis dan Patrol, fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas serta simpul transportasi penting seperti Stasiun Haurgeulis. Lebih jauh, kemandirian finansial kawasan ini didukung oleh objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, bersumber dari sektor pertanian lumbung padi beririgasi teknis di kawasan Gabuswetan dan Kroya serta zona industri dan perdagangan di kawasan pesisir. Parameter yang menunjukkan kondisi "Ideal", yang mencakup tersedianya fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas, keberadaan fasilitas penunjang (seperti pasar induk dan kantor pemerintahan), ketersediaan fasilitas transportasi (stasiun dan terminal), serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan basis demografi pendukung yang masif.

Sebaliknya, indikator yang berstatus “tidak ideal” justru berakar pada aspek kepadatan penduduknya. Dalam hal ini, besarnya jumlah penduduk di wilayah Indramayu Barat belum proporsional dengan luasnya bentang wilayah tersebut sehingga menciptakan kondisi keruangan yang tidak seimbang. Meskipun terdapat satu kelemahan tersebut, secara keseluruhan hampir seluruh parameter evaluasi (90%) telah berstatus ideal. Dalam kacamata teori Christaller, terpenuhinya mayoritas parameter ideal ini membuktikan bahwa Indramayu Barat tidak bisa lagi diklasifikasikan sekadar sebagai wilayah *hinterland* yang pasif. Wilayah ini telah berevolusi mencapai ambang batas fungsionalnya sendiri sehingga pemisahan administratif justru merupakan langkah rasional untuk menstabilkan kembali hierarki keruangan.

## **5. Respons Kebijakan dan Dinamika Regulasi Pemekaran (Tanggapan Pemerintah)**

Evaluasi terhadap dinamika tata ruang ini turut divalidasi oleh respons kebijakan dari otoritas pemerintahan lokal yang secara terbuka mendukung wacana pemekaran wilayah. Berdasarkan tanggapan resmi, Bupati Indramayu menegaskan bahwa penetapan dan pembangunan “titik nol” di Kecamatan Kroya merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam merespons ketimpangan pembangunan guna mengoptimalkan jangkauan pelayanan publik di kawasan barat. Komitmen afirmatif ini diwujudkan secara konkret melalui penyusunan program pembangunan tahun anggaran 2025 yang difokuskan pada penguatan infrastruktur dan kesiapan operasional calon daerah otonom baru. Dalam kacamata tata kelola ruang (*spatial governance*), dukungan penuh dari pemerintah daerah ini membuktikan adanya pengakuan institusional atas ketidakefektifan *range* (jangkauan) hierarki pelayanan sistem yang lama sehingga restrukturisasi batas wilayah dipandang sebagai sebuah urgensi (Sodikin, 2025). Walaupun pemerintah daerah dan provinsi sudah menyelesaikan semua syarat dan kajian penelitian, rencana pemekaran ini masih terhambat oleh kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan sementara pembentukan wilayah baru. Hal ini membuat Indramayu Barat berada dalam kondisi yang tidak biasa secara nyata, fasilitas dan kebutuhan masyarakat di sana sudah sangat layak untuk berdiri sendiri. Namun, pengakuan resmi sebagai daerah baru belum bisa terwujud karena aturan hukum masih sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Analisis teori Christaller menunjukkan bahwa tata ruang Kabupaten Indramayu tidak berfungsi dengan baik. Pusat kota gagal melayani wilayah daerah pinggiran secara merata. Akibat tidak terpenuhinya prinsip pemasaran ( $K=3$ ), transportasi ( $K=4$ ), dan administrasi ( $K=7$ ), masyarakat di kawasan barat mengalami kesulitan. Jarak yang jauh dan biaya transportasi yang mahal menciptakan hambatan bagi mereka, hal ini memicu protes dari masyarakat akibat ketimpangan fasilitas. Dengan penduduk lebih dari 700.000 jiwa dan kekuatan wilayah di Kecamatan Kroya, kawasan barat secara teori sudah mampu mandiri. Mereka tidak perlu lagi bergantung pada pusat kabupaten. Dukungan pemerintah daerah melalui pembangunan titik nol dan program infrastruktur menjadi bukti nyata perlunya pusat pertumbuhan baru. Meskipun aturan resminya masih terhambat kebijakan pemerintah pusat, pergerakan di lapangan membuktikan bahwa pemekaran wilayah adalah suatu kebutuhan mendesak demi keadilan tata ruang. Penelitian ini menegaskan bahwa Teori Tempat Sentral Christaller bukan sekedar teori kuno. Teori ini bisa menjadi alat ukur untuk melihat kapan suatu wilayah sudah terlalu jenuh dan tidak optimal lagi. Melalui teori ini, waktu yang tepat bagi sebuah daerah harus dimekarkan agar pelayanan publik dan keadilan pembangunan bisa berjalan seimbang dapat ditetapkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Indramayu Barat merupakan kebutuhan yang logis dan objektif untuk mewujudkan keadilan spasial serta pemerataan pembangunan. Fungsi jangkauan pelayanan (*range*), jaringan distribusi transportasi ( $K=4$ ), dan hierarki administrasi ( $K=7$ ) dalam sistem tata ruang Kabupaten Indramayu belum berjalan secara optimal sehingga masyarakat di kawasan barat masih harus menempuh jarak yang jauh dengan biaya tinggi untuk mengakses layanan publik. Kondisi tersebut turut mendorong pergeseran orientasi pelayanan ke wilayah kabupaten tetangga yang dinilai lebih mudah dijangkau. Analisis berdasarkan Central Place Theory menunjukkan bahwa Indramayu Barat telah melampaui ambang batas (*threshold*) fungsionalnya, baik dari sisi jumlah penduduk yang melebihi 700.000 jiwa maupun ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemekaran wilayah dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

## E. SARAN

Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Pusat disarankan untuk segera mengembangkan pusat pertumbuhan sekunder serta mendistribusikan fasilitas publik secara merata di wilayah barat. Langkah strategis ini penting untuk memangkas jarak tempuh dan biaya transportasi masyarakat, sekaligus menjaga agar interaksi ekonomi tetap berputar di daerah sendiri tanpa beralih ke kabupaten tetangga. Oleh karena itu, usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Indramayu Barat harus dipandang secara objektif sebagai instrument tata ruang yang logis untuk mengatasi ketimpangan spasial, bukan sekadar komoditas politik, mengingat wilayah tersebut secara teori sudah siap mandiri. Sementara itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengubah pendekatan deskriptif-kualitatif ini dengan mengintegrasikan metode kuantitatif melalui pemodelan Sistem Informasi Geografis (SIG) serta kajian kelayakan fisik dan ekonomi mendalam agar proyeksi layanan dan interaksi spasial di wilayah pemekaran dapat diukur secara matematis dan jauh lebih baik.

## F. DAFTAR RUJUKAN

- AlKheder, S., Alzarari, A., & AlSaleh, H. (2023). Urban construction-based social risks assessment in hot arid countries with social network analysis. *Habitat International*, 131(December 2022), 102730. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102730>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Luas Panen dan Produksi Padi Di Indonesia 2024 (Angka Tetap). *Badan Pusat Statistik*, 8(15), 52. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. (2024). *Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2024 (Indramayu Regency in Figures 2024)*. 43, 3–7. <https://indramayukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgzIzI=/jumlahpenduduk>
- Dmitriev, R. V, Gorokhov, S. A., & Agafoshin, M. M. (2024). From the “isolated states” to the central place system(s): water supply of the cities in modern Libya. *R-Economy*, 10(3), 291–301. <https://doi.org/10.15826/recon.2024.10.3.018>
- Dzhurka, N. G. (2024). Interregional Economic Interactions in Light of the Central Place Theory. *Reg. Res. Russ.*, 14, 126–142. <https://doi.org/10.1134/S2079970524600070>
- Faizal, A. (2026). *Penataan Ruang Pesisir dan Laut Konsep dan Kebijakan*. Deepublish.
- Jain, M. (2018). The effect of distance on urban transformation in the Capital Region, India. *International Planning Studies*, 23(1), 37–50. <https://doi.org/10.1080/13563475.2017.1329648>
- Jones, C. (2017). Spatial economy and the geography of functional economic areas. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 44(3), 486–503. <https://doi.org/10.1177/0265813516642226>

- Lkp. (2025, Desember 23) Ukir Sejarah, Bupati Lucky Hakim Resmikan Tugu Nol Kilometer Indramayu Barat. [Indramayukan.go.id. https://indramayukab.go.id/ukirsejarahbupatiluckyhakim-resmikan-tugu-nolkilometer-indramayu-barat/](https://indramayukab.go.id/ukirsejarahbupatiluckyhakim-resmikan-tugu-nolkilometer-indramayu-barat/)
- Koraag, R. A., Fitriani, F., Nurfaizal, M. D., Lestari, S. A. P., Permata, S., Basman, U. K., ... & Schouten, F. S. (2026). *Perencanaan Wilayah dan Kota: Konsep, Strategi, dan Implementasi Berkelanjutan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Martin, M., & Novotný, L. (2024). Urban hierarchy in Slovakia: a national and regional perspective. *Geographia Cassoviensis*, 18(2), 165–186. <https://doi.org/10.33542/GC2024-2-04>
- Putra, J. Y., & Ekomadyo, A. S. (2022). Hierarki dan Informalitas Sosial pada Produksi Ruang di Nagari Pariangan, Sumatera Barat. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 6(2), 206. <https://doi.org/10.31848/arcade.v6i2.931>
- Rian Nugraha, C., Trilusianthy Hidayat, J., & Syahbandar, M. Y. (2024). Analisis Pusat Pelayanan Kota di Wilayah Pelayanan B (Pasima) Kota Bogor. *Jendela Kota: Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Dan Kota*, 1(2), 25–40. <https://doi.org/10.33751/jekota.v1i2.67>
- Sodikin, S. (2025). Analisis Spasial Kesesuaian Penggunaan Lahan dan Arah Perbaikan Pola Ruang di Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4442–4453. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1777>
- Suherman, A., Maryani, E., Geografi, P., Indonesia, U. P., & Bekasi, K. (2024). Pemekaran Wilayah sebagai Solusi Ketimpangan Ruang di Kabupaten Bekasi: Studi Literatur. *IX*, 228–239. <https://doi.org/10.24815/jpg.v>